

## ANALISIS PENERAPAN *E-PROCUREMENT* SEBAGAI EFISIENSI PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA

Leny Diah Astari<sup>1</sup>, Mualifatul Dalatululum<sup>2</sup>, Nia Kurniasih<sup>3</sup>, Novita Devi Indahsari<sup>4</sup>  
Yuni Kurniasih

Universitas Tidar; Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah (56116). Telp/fax: (0293) 364113/ (0293) 362438.

e-mail: \* [1lenidyahastari19@gmail.com](mailto:1lenidyahastari19@gmail.com), [2mualifatuddalatululum@gmail.com](mailto:2mualifatuddalatululum@gmail.com),  
[3niakurniasih658@gmail.com](mailto:3niakurniasih658@gmail.com), [4novitadeviindahsari07@gmail.com](mailto:4novitadeviindahsari07@gmail.com)

---

### ABSTRACT

Bentuk *e-government* Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan menerapkan *e-procurement* dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa (lelang). *E-procurement* merupakan inovasi dari pengadaan secara konvensional ke pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Dari perubahan *procurement* konvensional ke *e-procurement* diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem *e-procurement*. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengacu dari berbagai referensi. Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Surabaya telah berjalan secara efisien. Hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai penghargaan yang diterima dan mampu memenuhi kriteria efisiensi, yang meliputi man, money, material, mechine, methode, marketing, minutes and information. Penerapan *e-procurement* merupakan tuntutan masyarakat kepada pemerintah dimana mereka menginginkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah diperoleh serta terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Keywords (*e-government*, *e-procurement*, implementasi, efisiensi)

---

### 1. PENDAHULUAN

*Good governance* (pemerintahan yang baik) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, *Good Governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Sedangkan menurut Mardiasmo (1999) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan *good governance* yaitu dengan cara melakukan perubahan dalam segala kegiatan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang biasa disebut dengan *e-government*. Dengan adanya pemanfaatan teknologi tersebut akan membawa perubahan yang mendorong terciptanya *Good Governance*. Seperti yang dikemukakan oleh Astuti (2005:6-7) bahwa “apa sesungguhnya yang ditawarkan oleh *e-govt* itu adalah merupakan keunggulan utama dari *Information Communication Technologies* (ICTs) yang mendorong terjadinya tiga perubahan yang mendasari terciptanya *good governance* di negara yang

sedang berkembang, yang meliputi: (1) *Automation*: yakni pergeseran dari pemrosesan informasi secara manual ke teknologi digital; (2) *Informatisation*: yakni mempercepat proses pengolahan informasi, misalnya dalam rangka pengambilan keputusan, dan implementasi keputusan; (3) *Transformation*: yakni penciptaan metode-metode pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.” Dengan adanya tiga perubahan tersebut tentu akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, seperti salah satunya yaitu terciptanya efisiensi pemerintahan. Hal tersebut terkait pemberian pelayanan yang lebih murah dan dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat serta pemerintah mampu bekerja lebih cepat.

Menurut Mulyamah (1987:3) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan sebuah ukuran dalam membandingkan antara rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Ukuran efisiensi menurut Usman (2011) dalam Claudy dkk yaitu proses penghematan 7M+1H dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar (*do things right*). 7M+1H merupakan sumberdaya yang meliputi *man, money, material, machines, methods, marketing, and minutes+information*. Sedangkan SP. Hasibuan (1984:233-4) mengatakan bahwa efisiensi merupakan

perbandingan yang terbaik antara sebuah input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya hasil optimal yang telah dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Jadi bisa disimpulkan efisien merupakan sebuah pemanfaatan sumber daya yang ada seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang optimal.

Pelaksanaan *e-government* di Indonesia dimulai pada 24 April tahun 2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) di Indonesia.

Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good govenance* Indonesia yaitu dalam hal pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik atau yang disebut dengan *e-procurement*. Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang menerapkan *e-procurement* dalam penyelenggaraan pemerintahan. *E-procurement* sendiri merupakan inovasi dari *procurement* secara konvensional. Menurut Sutedi (2012) *e-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Adanya *e-procurement* ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/ jasa secara konvensional. Seperti

prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam *procurement* konvensional ini, diantaranya (1) identifikasi kebutuhan barang/jasa (2) penentuan *vendor* (3) pemilihan *vendor* berdasarkan pertimbangan tertentu (4) pembuatan daftar barang/jasa yang akan dibeli (5) pengawasan barang/jasa yang dipesan (6) pemberian faktur (7) pembayaran. Adanya tahapan-tahapan tersebut memunculkan kurangnya transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan, yang kemudian akan memberikan dampak negatif seperti kerugian bagi pemerintah ataupun perusahaan itu sendiri.

Pelaksanaan *e-procurement* diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah dan diubah menjadi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Novitaningrum, 2014:3).

Permasalahan penelitian dari jurnal ini yaitu adanya *e-procurement* yang mempengaruhi efisiensi pemerintahan dalam mencapai *good governance*.

Terkait hal diatas, maka tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi *e-procurement* bagi efisiensi di pemerintah Kota Surabaya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengambil sumber dan pengumpulan data dari berbagai buku, jurnal, maupun sumber primer lainnya sebagai referensi.

### 2.1 Tinjauan Pustaka

*E-procurement* merupakan suatu proses pengadaan barang dan jasa melalui berbagai penyedia atau *vendor* yang dipilih melalui berbagai pertimbangan tertentu, kegiatan ini juga biasa disebut sebagai pelelangan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui jaringan elektronik.

Pengadaan secara elektronik meliputi perencanaan, penganggaran, pemilihan penyedia, proses pengadaan, pengelolaan kontrak, proses monitoring, pelacakan, evaluasi, pengawasan dan pembayaran (Siahaya, 2016:91).

Menurut Indrajit, dkk (2002:151) *e-procurement* dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBD secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Dalam aplikasi *e-procurement* ini dimunculkan seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pada pengumuman pemenang pelelangan secara *online*. Misi akhir dari penerapan *e-procurement* ini adalah bagaimana proses

pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak banyak membuang-buang waktu dan biaya.

Dengan *e-procurement*, proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskrimanif, dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan dan dapat meminimalisir praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pengadaan barang (Hartana, 2015:80).

Jadi, seluruh proses pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa dari pemerintah dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat dengan menggunakan aplikasi *e-procurement* secara *online*, dengan ini harapannya dapat membantu terwujudnya efektivitas dan efisiensi di bidang pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari upaya terciptanya *good governance*. *E-procurement* dianggap sebagai salah satu inisiatif *e-government* yang paling efektif memberikan hasil nyata dalam bentuk transparansi dan efisiensi pemerintah. *E-procurement* sering dianggap sebagai penggerak utama (*prime mover*) dari *e-government* (LKPP, 2009:132).

Efisiensi dari *e-procurement* mengandung dua aspek seperti yang dikemukakan dalam LKPP (2009:38), yaitu: (1) Efisiensi Proses: seberapa besar *e-procurement* mengurangi biaya yang dikeluarkan dan waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan. (2)

Efisiensi Harga: seberapa dekat harga yang ditawarkan terhadap harga pasar. Selain itu, bentuk efisiensi yang diciptakan dengan penggunaan *e-procurement* ini yaitu saat masih menggunakan *procurement* konvensional maka pihak yang terlibat harus bertatap muka secara langsung atau mendatangi instansi untuk mendapatkan berbagai informasi seputar pengadaan barang dan jasa, namun kini informasi yang dibutuhkan tersebut sudah tersedia dalam sistem.

## 2.2 Kerangka Teori

### a. Tujuan *E-Procurement*

Menurut Siahaya (2016:91) tujuan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) ada tujuh, yaitu: (1) memudahkan dalam proses kegiatan pengadaan (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (3) menghindari terjadinya penyimpangan (4) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat (5) meningkatkan efisiensi proses pengadaan (6) mendukung proses monitoring dan audit (7) memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

### b. Keuntungan Penggunaan *E-Procurement*

Menurut Yuwinanto (2013:218) keuntungan dari penggunaan *e-procurement* diantaranya: (a) Transparansi, adanya jaminan dan kemudahan untuk memperoleh informasi secara akurat dan memadai agar timbul sikap saling percaya antara pengguna (user) dan penyedia informasi. (b) Non

diskriminatif, artinya tidak mengenal perbedaan, asal memenuhi persyaratan sebagai pemenang, maka perusahaan tersebut yang menjadi pemenangnya. (c) Mengurangi kesempatan ber-KKN, dalam proses lelang pembelian barang dan jasa secara tradisional, kesempatan calon peserta lelang untuk melakukan pendekatan terhadap panitia lelang sangat besar, sehingga modal-modal gratifikasi yang berbau KKN sangat kental. (d) Memberikan peluang usaha kecil untuk berkembang, selama ini peluang paling besar pemenang tender selalu perusahaan dengan modal besar, hal ini menyebabkan peluang pengusaha kecil semakin terpuruk. (e) Tidak perlu bertatap muka, dalam proses *e-proc* peluang tatap muka dengan panitia lelang akan tereduksi dengan sendirinya, sehingga bisa diminimalisir terjadinya KKN yang semakin parah.

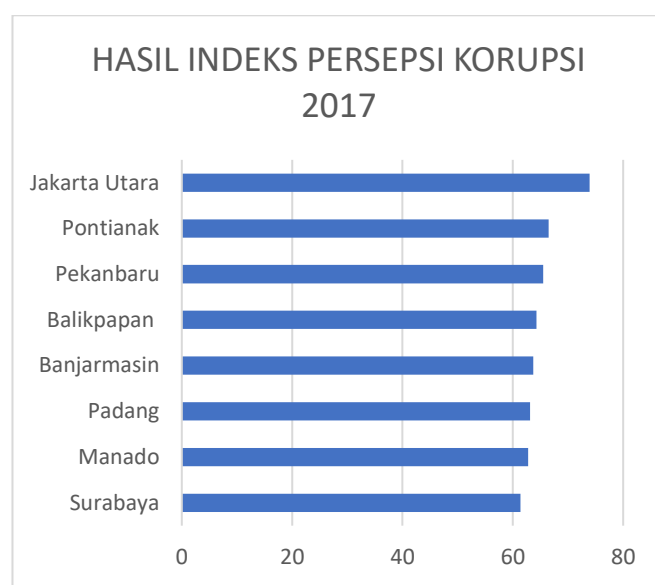
### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Implementasi *E-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya

Dalam hal ini *e-procurement* tidak hanya memberikan efisiensi pemerintahan, akan tetapi juga terkait pada transparansi anggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pentingnya transparansi dalam aspek pengelolaan anggaran ini didasari oleh banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Novitaningrum, 2014:2).

Pada tahun 2017, telah menunjukkan hasil indeks yang menyatakan bahwa Surabaya menduduki peringkat ke-8 dengan tingkat upaya pemberantasan korupsi yang tinggi.

Tabel 1.1



Sumber: Riset TI (*Transparency International*) Indonesia  
Tahun 2017

Melihat peringkat tersebut Pemkot Surabaya berhasil mengurangi indikasi korupsi dengan berbagai kemajuan teknologi informasi yang ada dan telah digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai transformasi sistem anggaran menjadi berbasis elektronik atau dengan istilah lain *e-governance*.

Menurut Wardiyanto (Novitaningrum, 2014) *e-procurement* dapat dilihat sebagai alat yang membantu pengelola pengadaan, maupun sebagai alat yang akan mendorong efisiensi belanja-belanja nasional dan meningkatkan daya saing usaha nasional melalui penciptaan satu pasar pengadaan

yang terbuka dan bersaing secara *fair*. *E-procurement* akan sedikit banyak membantu sebagian proses interaksi dengan peserta lelang dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga pemerintah Kota Surabaya berhasil meningkatkan efisiensi anggaran dalam bidang belanja barang dan jasa pemerintah.

Dibawah ini merupakan alur dari proses *e-procurement* di Kota Surabaya:

Tabel 1.2



Sumber: LPSE Kota Surabaya LKPP  
([lpse.surabaya.go.id/](http://lpse.surabaya.go.id/) 2006-2020)

Proses lelang pertama kali dilakukan melalui proses *Aanwijzing*, merupakan sebuah proses pertemuan untuk menje laskan mengenai pekerjaan sebuah tender atau proyek. Selanjutnya, pembukaan sampul yaitu berisi penawaran dari pihak vendor atau penyedia yang dilakukan pada 14 hari kerja sejak pengumuman paket pekerjaan. Setelah itu dilakukan tahap evaluasi dengan sistem

gugur oleh panitia pengadaan. Seleksi dilakukan dengan beberapa kriteria khusus. Kemudian, menetapkan beberapa pemenang dari beberapa penawaran yang masuk. Adanya monitoring untuk memastikan pemenang kembali sebelum di unggah pada portal pengumuman pemenang.

Menurut Jasin dkk (2007), terdapat faktor-faktor pendorong keberhasilan pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan *e-procurement* yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah dalam menerapkan program-program inovatif.
2. Dukungan SDM yang berkualitas.
3. Dasar hukum yang kuat.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

### 3.2 Perkembangan *E-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya

Menurut Yuwinanto (2013:224), *e-procurement* yang diterapkan di Surabaya merupakan salah satu sistem lelang elektronik berlangsung kurang lebih 8 tahun. *E-procurement* Kota Surabaya mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari pemerintah daerah, pusat maupun lembaga yang giat melakukan perbaikan kinerja pemerintahan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badzlina Daroyani Novitaningrum (2014) didapatkan hasil penelitian yaitu

mengenai perkembangan *e-procurement* di Kota Surabaya mulai tahun 2004-2014.

Tabel 1.3

Perkembangan *E-Procurement* Mulai Tahun 2004 Hingga Tahun 2014

| No | Tahun | Perkembangan <i>E-Procurement</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2004  | Awal mula <i>e-procurement</i> diterapkan di Pemerintah Kota Surabaya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | 2007  | Dalam 3 tahun setelah awal mula diterapkannya, masih terdapat indikasi korupsi pada 27 diantara 34 proyek pengadaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | 2010  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Kota Surabaya berada pada peringkat ke-3 teratas dari 50 kota di Indonesia dengan jumlah korupsi paling sedikit.</li> <li>- Sistem <i>e-procurement</i> kota Surabaya diadopsi oleh LKPP untuk diterapkan secara nasional pada kabupaten/kota lainnya ke Indonesia.</li> </ul>                                                                                  |
| 4  | 2011  | Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan sumbangsih skor tinggi atas inisiatif yang mencolok di beberapa bidang yakni transparansi dalam manajemen SDM dengan skor 7,58 (peringkat 3), akses publik dalam memperoleh informasi dengan skor 9,67 (peringkat 1), transparansi dalam pengadaan barang/jasa dengan skor 9,86 (peringkat 1) dan pelaksanaan saran perbaikan dari BPK/APIP/BPKP dengan skor 10 (peringkat 1). |
| 5  | 2013  | November 2013, jumlah paket pekerjaan yang dilelang sebanyak 94 paket dengan total anggaran mencapai 1,4 triliun. Akan tetapi, Pemkot Surabaya justru menghemat 22,93% dari                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      | efisiensi lelang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | 2014 | Sistem lelang yang ada memberikan kemudahan pada pelaksanaan pekerjaan, sehingga sebagian besar proyek pekerjaan akan dapat selesai tepat waktu. Sebagai contoh, data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) yang dilansir oleh harian Jawa Pos 7 Februari 2014, telah melelang 142 paket pembangunan meski kini baru bulan kedua, Februari. |

Sumber: Jurnal Novitaningrum (2014)

Berdasarkan data dari Warta Ekonomi dalam Sari (2012), bahwa pengadaan barang dan jasa yang telah ditransaksikan melalui sistem *e-procurement* terus meningkat. Hingga tahun 2011 telah terjadi peningkatan menjadi 11.800-an paket dengan nilai transaksi Rp. 19,8 Triliun dengan efisiensi Rp. 2,7 Triliun, padahal pada tahun 2010 paket yang ditransaksikan harus sebesar 6.200 paket dengan nilai transaksi Rp.13 Triliun dengan efisiensi Rp.1,3 Triliun.

Hal ini menjadikan Kota Surabaya sebagai kota percontohan pelaksanaan *e-procurement*. Kota Surabaya juga mendapatkan penghargaan seperti *E-Proc Award* pada tahun 2013 oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) atas keberhasilan transformasi sistem lelang manual menuju sistem lelang elektronik. Penghargaan lainnya berupa *FutureGov Award* Indonesia pada tahun 2013 oleh Jame Smith, sebagai *Managing Director FutureGov* yang berpusat di Singapura atas

prestasinya dalam membuat program informasi dan administrasi yang transparan, dengan menggunakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). *E-procurement* Pemerintah Kota Surabaya juga telah mendapatkan sertifikat ISO 27001:2005 dalam *Information Security Management System* dengan pengamanan sangat rahasia, sehingga menjamin tidak adanya kebocoran dalam proses pelelangan melalui *e-procurement*.

### 3.3 Analisis Efisiensi *E-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya

Bersarkan teori menurut Usman (2011), *e-procurement* dapat dikatakan efisiensi apabila mampu memenuhi beberapa kriteria prinsip efisiensi. Penulis menganalisis bahwa efisiensi dalam penerapan *e-procurement* di Pemerintahan Kota Surabaya dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Man*, yaitu terkait jumlah penggunaan sumber daya manusia berdasarkan dengan *skill* atau kemampuannya dalam penggunaan teknologi informasi. Mochammad Jasin, dkk (2007:22-3) dalam bukunya “Mencegah Korupsi Melalui *e-procurement*: Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintahan Kota Surabaya” bahwa disini Pemerintah Kota Surabaya dapat menghemat anggaran belanja pegawai yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Pegawai yang dilibatkan adalah sumber daya manusia yang

memiliki kemampuan dalam menjalankan teknologi informasi.

2. *Money*, yaitu anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Dalam penggunaan anggaran tersebut dilakukan seminimal mungkin untuk penghematan biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan yang dilansir berita Kompas.com menyatakan bahwa, Pemerintahan Kota Surabaya dalam penerapan *e-procurement* telah mampu melakukan penghematan sebesar 400 miliar dalam hal pengadaan barang dan jasa.
3. *Material*, yaitu pengurangan penggunaan bahan-bahan untuk kegiatan administrasi berupa pemakaian kertas yang berlebih. Hal ini sesuai dengan yang ditulis oleh Jasin, dkk (2007:15) dalam bukunya “Mencegah Korupsi Melalui *E-Procurement*: Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan *E-Procurement* di Pemerintahan Kota Surabaya” Di Kota Surabaya dengan menerapkan *e-procurement* maka dapat menghemat perlengkapan-perengkapan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
4. *Machines*, yaitu suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien apabila mampu memanfaatkan mesin atau teknologi informasi semaksimal mungkin. Menurut Jasin, dkk (2007:24) dalam bukunya “Mencegah Korupsi Melalui *E-Procurement*: Meninjau

Keberhasilan Pelaksanaan *E-Procurement* di Pemerintahan Kota Surabaya”, bahwa dalam pelaksanaan sistem *e-procurement*, Pemerintahan Kota Surabaya ini mampu memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

5. *Methods*, artinya penggunaan metode yang lebih sederhana. Awalnya kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kota Surabaya dilakukan secara konvensional yang mengharuskan tatap muka langsung dan menggunakan prosedur yang panjang sehingga sangat memakan waktu. Namun setelah Pemerintah Kota Surabaya menerapkan *e-procurement*, metode yang digunakan dapat lebih efisien secara waktu karena tidak perlu tatap muka langsung dan prosedurnya lebih sederhana. Mulai dari pendaftaran, penawaran, penyanggahan sampai penentuan pemenang bisa dilakukan secara on line atau hanya membuka alamat situs web lembaga pemerintah yang dituju. Kendala proses komunikasi, jarak dan waktu akhirnya bisa diminimalisir berkat sebuah kemajuan teknologi (Yuwinanto, 2013:218).
6. *Marketing*, yaitu mampu menunjang pasar yang lebih luas. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari *Mbizmarket*, adanya pasar pengadaan secara elektronik dapat menciptakan

pasar yang lebih terbuka, luas, dan terjangkau.

7. *Minutes Information*, yaitu penyebaran informasi dapat lebih mudah dan cepat. Melalui *e-procurement*, Pemerintah Kota Surabaya dapat menyebarkan seluruh informasi yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat yang tentunya juga lebih murah (Kholis, 2001:212).

#### 4. SIMPULAN

*E-government* dapat mewujudkan efisiensi dalam pemerintahan dengan menerapkan salah satu pelayanan elektronik berupa aplikasi. Aplikasi ini berguna untuk kegiatan pengadaan barang atau jasa (lelang) yang biasa disebut dengan *e-procurement*. *E-procurement* telah diterapkan di Kota Surabaya dengan capaian yang sudah baik, sehingga meraih penghargaan pada tahun 2013 berupa *E-Proc Award* dan *featureGov Award* Indonesia oleh Jame Smith yang berpusat di Singapura. Selain itu, *e-procurement* Kota Surabaya juga telah mendapatkan Sertifikat ISO 27001:2005 dalam *Information Security Management System*. Pemerintahan Kota Surabaya sudah dikatakan efisien dengan adanya *e-procurement* tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ukuran efisiensi yang meliputi 7m+1h (*man, money, material, method, mechine, marketing, and minute information* ).

#### SARAN

Dalam penerapan *e-procurement*, berpotensi untuk mengurangi tindakan korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pegawai yang menjalankan sistem *e-procurement* tersebut harus benar-benar berkomitmen tinggi serta akuntabel agar tidak terdapat manipulasi data.

Untuk efisiensi yang telah berhasil diterapkan dan capaian prestasi/penghargaan agar di pertahankan dan ditingkatkan. Dengan cara memberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pegawai pemerintah Kota Surabaya agar lebih kompeten dalam merespon kebutuhan masyarakat. Selain itu, juga melibatkan seluruh SKPD secara rutin dan berkala dalam sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan untuk mengantisipasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah Kota Surabaya. Dengan demikian efisiensi pemerintahan Kota Surabaya bisa menjadi contoh/pedoman bagi daerah-daerah di Indonesia dan lainnya dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astuti, Sri Yuni Woro. Peluang Dan Tantangan Penerapan *E-Governance* Dalam Konteks Otonomi Daerah, Universitas Airlangga. 2005.
- [2] Claudy, Fransiskus, et al. Efisiensi Sistem *E-Procurement* dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali), Universitas Udayana.
- [3] Hardjaloka, Loura. Studi Penerapan *E-Government* di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik, Media Pembinaan Hukum Nasional. 2014.
- [4] Hartana, Mugi. Efektivitas Penerapan *E-Government* dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. 2015.
- [5] Hasibuan, S.P. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta: Penerbit Gunung Agung. 1984.
- [6] Implementasi *E-Procurement* sebagai Inovasi Pelayanan Publik, LKPP. 2009.
- [7] Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, Riset TI (*Transparency International*) Indonesia. 2017. Diakses 2 November 2019. Laman: [http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017\\_Sheet-Infographic\\_Launch.pdf](http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Sheet-Infographic_Launch.pdf)
- [8] Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta. 2002.
- [9] Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) di Indonesia.
- [10] Irawan, Bambang. Studi Analisis Konsep *E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*, Universitas Mulawarman. 2013.
- [11] Jasin dkk. Mencegah Korupsi Melalui *E-Procurement*, Jakarta. 2007.
- [12] Kholis, Muhammad. Efektifitas dan Efisiensi *E-Procurement* (Studi Deskriptif tentang Efektifitas dan Efisiensi Program Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Online (*E-Procurement*) di Pemerintah Surabaya), Universitas Airlangga. 2001.
- [13] LPSE Kota Surabaya LKPP 2006-2020. Diakses 2 November 2019. Laman: <https://lpse.surabaya.go.id/eproc/>
- [14] Mardiasmo. Perpajakan Edisi 4, Yogyakarta. 1999.
- [15] Mulyamah. Manajemen Perubahan, Jakarta: Yudhistira. 1987.
- [16] Novitaningrum, Badzlina Daroyani. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui *Electronic Procurement* (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya), Universitas Airlangga. 2014.
- [17] Nurchana, Arindra Rossita Arum, et al. Efektivitas *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro), Universitas Bwawijaya.
- [18] Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.
- [19] Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden

- Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- [20] Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- [21] Sari, Kusuma Dewi Arum, dan Wahyu Agus Winarno. Implementasi *E-Government System* Dalam Upaya Peningkatan *Clean And Good Governance* di Indonesia, Universitas Jember. 2012.
- [22] Siahaya, Willem. Manajemen Pengadaan (*Procurement Management*), Penerbit: In Media Bogor. 2016.
- [23] Suryowati, Estu. Terapkan “*E-procurement*” Pemkot Surabaya Hemat Rp 400 Miliar per Tahun, Kompas. 2014.
- [24] Yuwinanto, Helmy Prasetyo. Implementasi *E-Procurement* pada Pemerintah Kota Surabaya, Universitas Airlangga. 2013.
- [25] Mbizmarkert (26 Juni 2019). *E-procurement*: Fitur Andalan B2B Marketplace Mbizmarket.co.id. diakses 5 Mei 2020 . Laman: <https://www.mbizmarket.co.id/news/fitur-e-procurement/>
- [26] Kompas.com (14 Novermber 2014). Terapkan.*E-Procurement* Pemkot Surabaya Hemat Rp.400 Miliar Per Tahun. diakses 5 Mei 2020. Laman: <https://money.kompas.com/read/2014/11/14/193250626/Terapkan.E-procurement.Pemkot.Surabaya.Hemat.Rp.400.Miliar.Per.Tahun>